

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
BELANJA MODAL, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Dinda Rossa Nasa

1119 31020

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DINDA ROSSA NASA

Nomor Induk Mahasiswa: 111931020

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 15 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Tri Ciptaningsih, S.E., M.M., Ak., CA.

Penguji

Dheni Indra Kusuma, S.E., M.Si., Ak., CA., CFP.

Yogyakarta, 15 Juni 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Seluruh Indonesia. Kinerja keuangan daerah menunjukkan seberapa baik pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah telah mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi yang telah ditetapkan untuk program selama periode waktu tertentu. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 34 dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi tahun 2019 - 2021. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan variabel Belanja modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi. Untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Original Revenue (PAD), Capital Expenditure, and Balancing Funds on the Financial Performance of Provincial Governments throughout Indonesia. Local financial performance shows how well the implementation of the program or activities of the local government has achieved the goals, objectives, mission, and vision that have been set for the program over some time. The sampling method used is the purposive sampling technique. The sample obtained was 34 using the financial statements of provincial local governments for 2019 - 2021. The data analysis technique in this study uses multiple linear regression analysis. The results show that the variable Capital Expenditure has a positive effect on the Financial Performance of the Provincial Government, while the Regional Original Revenue (PAD), and the Balancing Fund do not affect the Financial Performance of the Provincial Government. To improve the financial performance of local governments, the government is expected to maximize regional resources to improve community welfare and reduce the level of dependence on funds from the central government.

Keywords: *Local Original Revenue (PAD), Capital Expenditure, Balancing Fund, Local Government Financial Performance.*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun “Penyelenggaraan untuk urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah, menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pemerintahan daerah”. Otonomi daerah yaitu hak, kekuatan dan komitmen wilayah otonom untuk mengarahkan dan mengawasi usaha pemerintah serta kepentingan lingkungan wilayah setempat sesuai dengan hukum serta panduan yang berlaku sehingga memiliki kebebasan di wilayah tersebut untuk menghasilkan peraturan daerah, menyusun serta melaksanakan kebijakan, dan mengawasi akun terdekat dengan bebas.

Kinerja keuangan daerah menunjukkan seberapa baik pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah telah mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi yang telah ditetapkan untuk program selama periode waktu tertentu. Pendanaan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini harus dikelola melalui sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaporan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 bahwasannya dalam hal ini pemerintah daerah memiliki hak, berikut dengan kewajiban, dan punya suatu wewenang guna

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melakukan pengaturan, dan juga mengurus sendiri apa yang menjadi urusan pemerintah berikut dengan kepentingan dari masyarakat daerah tersebut, kinerja mereka harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah harus dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh uang yang masuk ke kas daerah yang diperoleh dari sumber-sumber di daerah tersebut dan digunakan untuk kebutuhan daerah. Hal ini dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari berbagai jenis pendapatan di daerah PAD dipungut sesuai dengan peraturan daerah Indonesia yang berlaku. Akibatnya, setiap daerah harus berusaha menghimpun dana tersebut sebanyak mungkin.

Dengan memanfaatkan peran belanja modal dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh suatu sumber keuangan yang muasalnya dalam hal ini ialah dari kekhususan daerah, yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran belanja modal dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah.

Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* dan teori *good governance*. Teori *stewardship* yang dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang menetapkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi (Hernandez, 2008), sedangkan *good governance* sering diartikan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara teori, *good governance* terdiri dari dua konsep yaitu nilai-nilai yang mengutamakan kehendak rakyat dan nilai-nilai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang berfokus membantu masyarakat mencapai keadilan sosial, kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan (Sari, 2012).

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan dokumen yang amatlah krusial dalam rangka mendapatkan informasi sebagaimana dalam hal ini berelevansi dengan posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, dan catatan – catatan lain yang relevan dengan keadaan keuangan sebuah entitas. Suatu laporan keuangan akan menggambarkan kinerja operasional suatu entitas sepanjang periode tertentu. Menurut (Kasmir, 2008) berpendapat bahwa: "Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi)".

2. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemda dapat memberitahu seberapa baik kinerja keuangan daerah, termasuk penerimaan dan belanja yang dicapai dalam periode anggaran tertentu terhadap indikator ekonomi yang ditentukan oleh kebijakan atau ketentuan perundang – undangan. Kinerja keuangan daerah juga menunjukkan seberapa baik daerah memenuhi program dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sijabat, 2014) kinerja keuangan didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan pemda dimana dalam hal ini diukur dengan indicator

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keuangan yang dalam hal ini bisa dilihat dari hasil pertanggung-jawaban APBD.

3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mengacu pada pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004 terkait “Perimbangan Keuangan Antara Pusat, Daerah, PAD” adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah, yang dihimpun menurut ketentuan peraturan perundang – undangan. Kegiatan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah. Sektor PAD dalam hal ini sejatinya amatlah penting dikarenakan menentukan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017:23). Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan otonomi yang dimilikinya.

4. Pengertian Belanja Modal

Menurut Halim (2004) Belanja modal adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk memperoleh aktiva tetap dan aktiva lain yang berguna selama lebih dari satu tahun anggaran. Belanja modal menurut jenisnya merupakan jenis pengeluaran daerah yang memiliki peranan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, karena belanja modal merupakan kegiatan yang diperkirakan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah melalui pembangunan jalan, jembatan, pabrik, dan lain – lain. Belanja modal mengacu pada pengeluaran dengan manfaat melebihi satu tahun fiskal yang meningkatkan sumber daya atau kekayaan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintah dan mendorong peningkatan anggaran operasi dan pemeliharaan.

5. Pengertian Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana hibah yang diberikan oleh negara kepada daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan daerah merupakan suatu penerimaan dari sumber ekonomi asli daerah yang dalam hal ini dipungut dengan sebaik mungkin mengacu pada perda. Pengertian PAD mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 bahwasannya PAD yakni satu dari berbagai sumber penerimaan daerah sebagaimana hal ini dikaji demi dimanfaatkan sebagai modal bagi pemda guna meminimalisir pembiayaan bagi pengusaha serta pembangunan daerah. Dependensi pada dana pemerintah. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah juga menemukan perbedaan hasil.

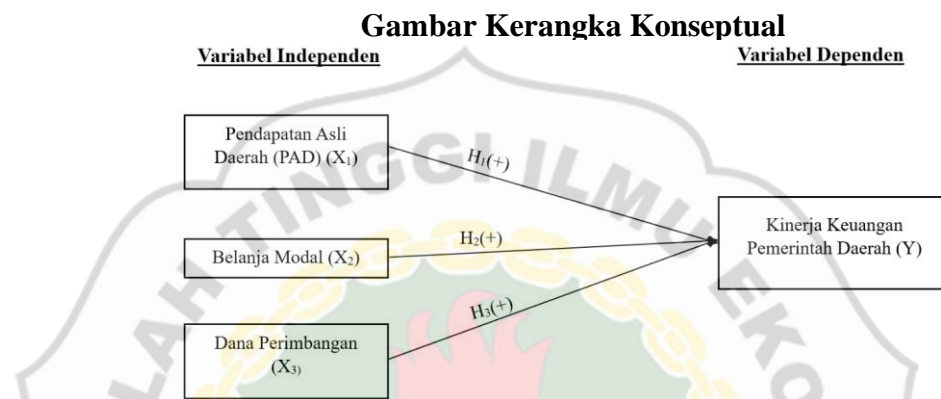
6. Pengertian Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar tingkat efisiensi dari operasional kegiatan ataupun proyek dalam menjalankan komparasi antara keluaran dan masukan. Rasio efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dan total pendapatan yang diterima (Sartika, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio kurang dari 100%,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan kata lain semakin kecil presentase dari perbandingan tersebut maka akan semakin efisien.

7. Kerangka Konseptual



Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji serta mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang memanfaatkan data laporan pelaksanaan APBD dan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) periode 2019-2021 yang dipublikasikan di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara (DJPK) atau djpk.kemenkeu.go.id.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Kriteria yang digunakan dalam penarikan sampel pemda provinsi di Indonesia untuk penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah Provinsi yang mempublikasikan laporan realisasi APBD dan TKDD pada website djpk.kemenkeu.go.id.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Wilayah provinsi yang secara konsisten memberikan informasi data laporan keuangan sepanjang periode waktu penelitian yaitu tahun 2019 – 2021.
3. Wilayah provinsi yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan.

Dari 38 provinsi di Indonesia, yang memenuhi kriteria diatas didapatkan 34 provinsi yang dapat digunakan sebagai sample dalam penelitian ini.

Sampel Daerah Provinsi

No.	Provinsi
1	Jawa Barat
2	Jawa Tengah
3	D.I. Yogyakarta
4	Jawa Timur
5	Kalimantan Barat
6	Kalimantan Tengah
7	Kalimantan Selatan
8	Kalimantan Timur
9	Aceh
10	Sumatera Utara
11	Sumatera Barat
12	Riau
13	Jambi
14	Sumatera Selatan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

15	Bengkulu
16	Lampung
17	D. K. I Jakarta
18	Sulawesi Utara
19	Sulawesi Tengah
20	Sulawesi Selatan
21	Sulawesi TenggaraBali
22	Nusa Tenggara Barat
23	Nusa Tenggara Timur
24	Maluku
25	Papua
26	Maluku Utara
27	Banten
28	Bangka Belitung
29	Gorontalo
30	Kepulauan Riau
31	Papua Barat
32	Sulawesi Barat
33	Kalimantan Utara
34	Bali

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (X1)	102	7.03	17.52	24.55	21.4745	1.24115
Belanja Modal (X2)	102	4.18	18.99	23.17	20.6681	.65919
Dana Perimbangan (X3)	102	2.80	21.07	23.87	22.1001	.64737
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Y)	102	.40	.82	1.22	.9989	.05843
Valid N (listwise)	102					

Sumber: data sekunder yang diolah

Tabel diatas merupakan output dari *Descriptive Statistics* yang meliputi *range, mean, minimum, maximum*, dan deviasi untuk variabel pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penjelasan variabel penelitian dengan sampel statistik deskriptif sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada hasil pengolahan statistik deskriptif variabel PAD menunjukkan nilai range sebesar 7.03, nilai maksimum 24.55 terjadi pada Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019, nilai minimum 17.52 terjadi pada Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021, nilai mean sebesar 21.4745 dan nilai deviasi sebesar 1.24115.

b. Belanja Modal

Pada hasil pengolahan statistik deskriptif variabel belanja modal menunjukkan nilai range sebesar 4.18, nilai maksimum 23.17 terjadi pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019, nilai minimum 18.99 terjadi pada Provinsi Gorontalo pada tahun 2021, nilai mean sebesar 20.6681 dan nilai deviasi sebesar 0.65919.

c. Dana Perimbangan

Pada hasil pengolahan statistik deskriptif variabel dana perimbangan menunjukkan nilai range sebesar 2.80, nilai maksimum 23.87 terjadi pada Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021, nilai minimum 21.07 terjadi pada Provinsi Gorontalo pada tahun 2020, nilai mean sebesar 22.1001 dan nilai deviasi sebesar 0.64737.

d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada hasil pengolahan statistik deskriptif variabel kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan *range* sebesar 0.40, nilai maksimum 1.22 terjadi pada Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019, nilai minimum .82 terjadi pada Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021, nilai *mean* sebesar 0.9989 dan nilai deviasi sebesar 0.05843.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada pengujian ini menggunakan cara uji non parametric Kolmogorov Smirnov (K-S). Hasil pengujuannya seperti tabel berikut ini:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.05678203	
Most Extreme Differences	Absolute	.073	
	Positive	.060	
	Negative	-.073	
Test Statistic			.073
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.622 ^e	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.609
		Upper Bound	.634
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber: data sekunder yang diolah

Pengujian *non parametric* Kolmogorov Smirnov (K-S) pada penelitian ini menggunakan nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)*. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas 0.05, maka data berdistribusi normal ($\text{sig} > 0.05$), sebaliknya apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* di bawah 0,05, maka data tidak berdistribusi normal ($\text{sig} < 0.05$). Hasil uji

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.200, hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan signifikansi lebih dari 0.05.

Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikoliniearitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	.987	.241		4.101	.000		
	PAD (X1)	-.003	.009	-.072	-.387	.700	.276	3.622
	Belanja Modal (X2)	.032	.014	.363	2.293	.024	.385	2.595
	Dana Perimbangan (X3)	-.026	.019	-.291	-1.374	.173	.215	4.641

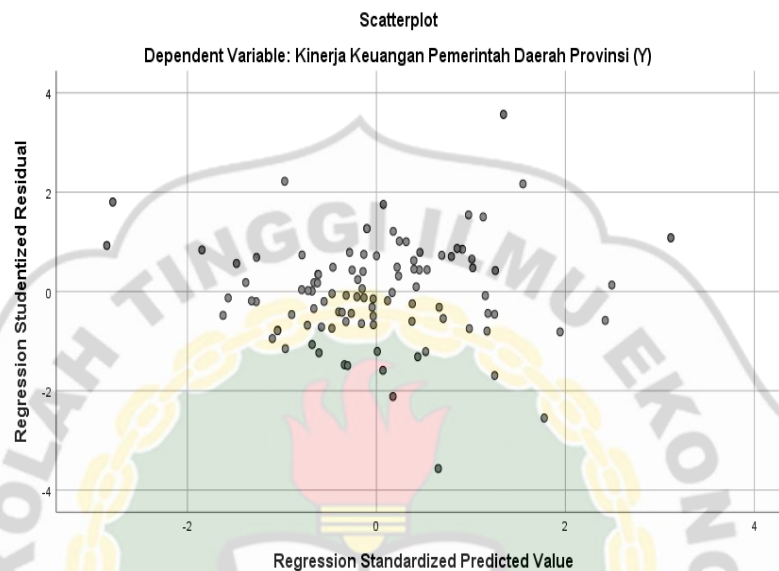
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Y)
Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas ini dapat diketahui nilai Tolerance dan VIF. Berdasarkan tabel hasil pengujian multikolinearitas untuk variabel PAD (X1) adalah 0.276, variabel Belanja Modal (X2) sebesar 0.385, dan variabel Dana Perimbangan sebesar 0.215. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai tolerance lebih dari 0.1 dan nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka model penelitian tidak terdapat multikolinearitas.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas



Sumber: data sekunder yang diolah

Sebaran di atas menunjukkan bahwa titik – titik tersebar dan tidak membentuk pola tertentu, serta titik – titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.236 ^a	.056	.027	.05764	2.024
a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X3), Belanja Modal (X2), PAD (X1)					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Y)					

Sumber: data sekunder yang diolah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilakukan perhitungan untuk mengukur proporsi korelasi. Dari tabel diatas diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 2.024 selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%. Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa nilai $k = 3$, dan $n = 102$. Sehingga diperoleh nilai du dari tabel DW sebesar 1.7383. Nilai $(4 - du)$ adalah $(4 - 1.7383 = 2.2617)$. Dapat disimpulkan $du (1.7383) < Durbin Watson (2.024) < 4 - du (2.2617)$, atau nilai *Durbin Watson* berada di antara nilai du dan $(4 - du)$, sehingga model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.987	.241		4.101	.000
	PAD (X1)	-	.009	-.072	-.387	.700
	Belanja Modal (X2)	.032	.014	.363	2.293	.024
	Dana Perimbangan (X3)	-	.019	-.291	-	.173
		.026			1.374	

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Y)

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diatas persamaan linier bergandanya adalah:

$$Y = 0.987 - 0.003 + 0.032 - 0.26 + e$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kostanta (α)

Berdasarkan hasil perhitungan persamaan regresi diatas diketahui nilai kostanta positif, hal ini menunjukkan pengaruh positif variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3)

2. Koefisien Regresi (β_1 PAD)

Pada regresi PAD nilai koefisiennya sebesar -0.03 maka hal ini menunjukkan setiap adanya kenaikan PAD satu satuan, kinerja keuangan pemerintah akan turun menjadi 0.003% dengan asumsi variabel lainnya tetap.

3. Koefisien Regresi (β_2 Belanja Modal)

Pada regresi belanja modal nilai koefisiennya sebesar 0.032 maka hal ini menunjukkan setiap adanya kenaikan belanja modal satu satuan, kinerja keuangan pemerintah akan naik menjadi 0.032% dengan asumsi variabel lainnya tetap.

4. Koefisien Regresi (β_3 Dana Perimbangan)

Pada regresi dana perimbangan nilai koefisiennya sebesar -0.26 maka hal ini menunjukkan setiap adanya penurunan dana perimbangan satu satuan, kinerja keuangan pemerintah akan naik menjadi 0.026% dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.236 ^a	.056	.027	.05764	2.024
a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X3), Belanja Modal (X2), PAD (X1)					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Y)					

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan data pengujian diatas, diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0.056 pada kolom Adjusted R². Nilai 0.056 sama dengan 5,6%. Angka tersebut diasumsikan variabel independen berpengaruh 5,6% terhadap variabel dependen, dan 94,4% sisanya disebabkan oleh variabel lain. Semakin rendah presentase nilai koefisien determinasi, semakin lemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan jika presentasinya tinggi sehingga pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen kuat.

Uji F

Uji F atau uji simultan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat berpengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.019	3	.006	1.920	.131 ^b
	Residual	.326	98	.003		
	Total	.345	101			
Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Y)						
Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X3), Belanja Modal (X2), PAD (X1)						

Sumber: data sekunder yang diolah

Tabel uji menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan, hasilnya menunjukkan nilai signifikansi 0,131, yang lebih besar dari 0.05.

Uji t

Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.987	.241		4.101	.000
	PAD (X1)	-.003	.009	-.072	-.387	.700
	Belanja Modal (X2)	.032	.014	.363	2.293	.024
	Dana Perimbangan (X3)	-.026	.019	-.291	-1.374	.173
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Y)						

Sumber: data sekunder yang diolah

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari hasil pengujian mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0.700 nilai tersebut lebih besar dari α yaitu $0.700 > 0.05$ dan nilai B sebesar -0.003. Maka dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan hipotesis pertama (H_1) ditolak.

2. Pengaruh belanja modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil uji variabel belanja modal (X2) pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang didapat adalah 0.024 nilai tersebut kurang dari α yaitu $0.024 < 0.05$ dan nilai B sebesar 0.032. Sehingga, diartikan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan hipotesis kedua (H_2) diterima.

3. Pengaruh dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil uji mengenai dana perimbangan (X3) pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0.173 nilai tersebut lebih besar dari α yaitu $0.173 > 0.05$ dan nilai B sebesar - 0.026. Maka dapat diartikan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Pembahasan

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena PAD bukan satu-

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

satunya sumber pendapatan daerah, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi.

2. Belanja modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, karena belanja modal adalah gambaran dari berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana publik yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi.
3. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini dapat diartikan semakin banyak suatu daerah menerima dana perimbangan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut kurang optimal.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian pada saat menyusun penelitian ini sebagai berikut:

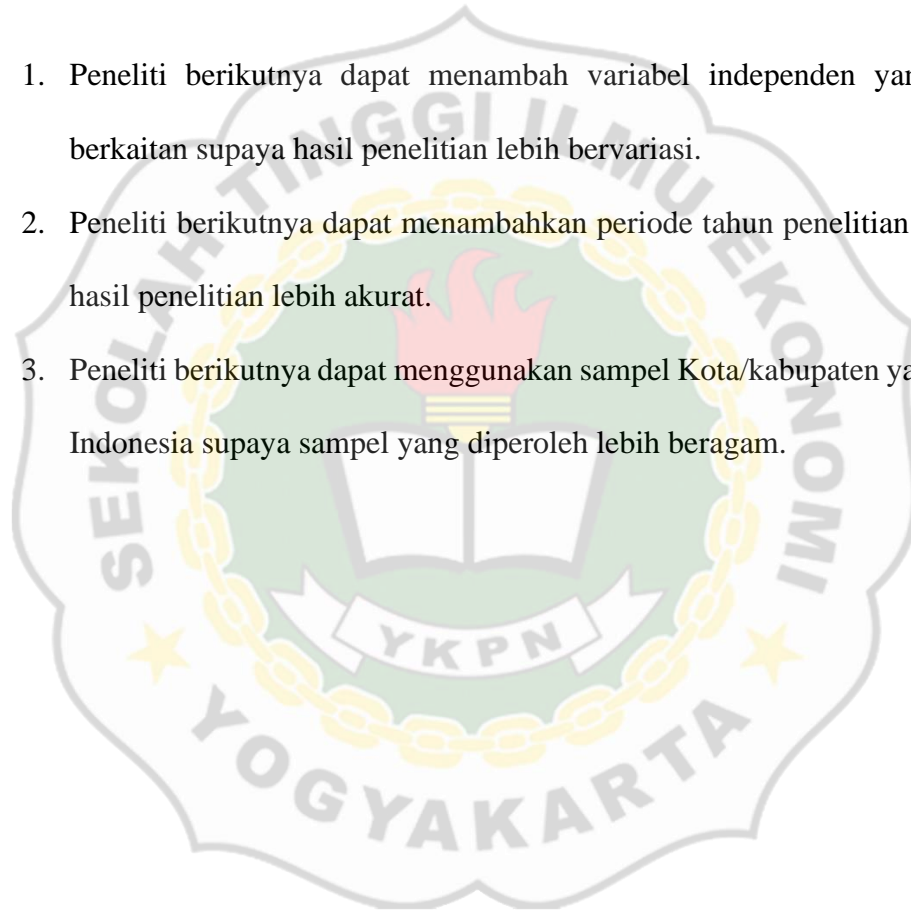
1. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas PAD, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan saja.
2. Rentan waktu penelitian terbatas tiga tahun, dari tahun 2019 sampai dengan 2021.
3. Sampel penelitian ini masih terlalu luas, peneliti menggunakan sampel seluruh daerah provinsi di Indonesia.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama yaitu analisis faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Peneliti berikutnya dapat menambah variabel independen yang masih berkaitan supaya hasil penelitian lebih bervariasi.
2. Peneliti berikutnya dapat menambahkan periode tahun penelitian sehingga hasil penelitian lebih akurat.
3. Peneliti berikutnya dapat menggunakan sampel Kota/kabupaten yang ada di Indonesia supaya sampel yang diperoleh lebih beragam.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salmeba Empat
- Akbar, Y. R., & Maraini, M. (2021). *The Role of Good Governance in Economic Growth: Mediated By Regional Financial Performance And Capital Expenditure Allocation*. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2(3), 194-208.
- Anwar, M. L. (2016). *Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2016). *Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1924-1950.
- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2016). *Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1924–1950.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). *Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 3(2), 95–102.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020*. *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 612-621.
- Budiana, R., & Rahayu, S. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2020)*. *eProceedings of Management*, 8(6).